

Analisis Manajemen Pendukung dalam Pengelolaan Obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur

Analysis of Management Support at Kolaka Timur Public Health Office

Angela Flora Stephanie Lawalata, Nanang Munif Yasin*, Satibi

Fakultas Farmasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Corresponding author: Nanang Munif Yasin: Email: nanangy@yahoo.com

Submitted: 09-05-2023

Revised: 09-05-2023

Accepted: 15-06-2023

ABSTRAK

Management Support diperlukan dalam menunjang kegiatan pengelolaan obat dari tahap seleksi obat, perencanaan obat, permintaan dan penerimaan obat, penyimpanan obat, pendistribusian obat, pengendalian obat, pencatatan, pelaporan, pengarsipan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis gambaran *Management Support* dalam pengelolaan obat yang meliputi organisasi, sumber daya manusia, anggaran dan Sistem Manajemen Informasi yang mempengaruhi proses pengelolaan obat sebagai bentuk evaluasi dan pengembangan kebijakan dalam pengelolaan obat. Penelitian ini merupakan penelitian *deskriptif*, data di kumpulkan melalui penelusuran data pengelolaan obat tahun 2020-2021, observasi dan wawancara mendalam menggunakan lembar checklist dan pedoman wawancara yang telah divalidasi oleh *expert judgement*, data dianalisis secara *content analysis*. Berdasarkan hasil penelitian organisasi di Dinas Kesehatan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur No. 56 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Kabupaten Kolaka Timur, Anggaran pengelolaan obat bersumber dari dana DAK dan DAU namun pemanfaatannya masih terbatas, SDM di Instalasi Farmasi sudah cukup namun terbatas pada staf perencanaan dan pengadaan, pengelolaan obat memanfaatkan SIM dari Perencanaan hingga pendistribusian obat namun masih terbatas oleh sarana-prasarana, dari hasil penelitian pengelolaan obat belum berjalan optimal karena *Management Support* di Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur belum sepenuhnya dengan baik.

Kata Kunci: Dinas Kesehatan; kolaka timur; *manajemen support*; pengelolaan obat

ABSTRACT

Management Support is needed to support drug management activities from selection, planning, request and receipt, storage, distribution, control, recording, reporting, archiving, monitoring and evaluation of drug management at the Kolaka Timur District Health Office, this research conducted to analyze the description of Management Support in drug management which includes organization, human resources, finance and SIM that affect the drug management process as a form of evaluation and development of policies in drug management. This research is a descriptive study, data was collected through data tracking on drug management for 2020-2021, observation and in-depth interviews using checklist sheets and interview guidelines that have been validated by expert judgment, data were analyzed by content analysis. Based on the results of organizational research at the Health Service in accordance with the Kolaka Timur Regency Regional Regulation No. 56 of 2016 concerning the Organization and Work Procedure of the Kolaka Timur Regency Service, the drug management budget is sourced from DAK and DAU funds but its utilization is still limited, the Pharmacy Installation has 10 employees and 3 people in the planning and procurement sector who play a role in drug management, drug management utilizes a SIM from planning to drug distribution but still limited by infrastructure. From the result of this study Management Support at the Kolaka Timur District Health Office has not run optimally.

Keywords: health office; Kolaka Timur; management support; drug management

PENDAHULUAN

Pengelolaan obat yang meliputi tahap seleksi obat, perencanaan obat, permintaan dan penerimaan obat, penyimpanan obat, pendistribusian obat, pengendalian obat, pencatatan, pelaporan, pengarsipan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan obat (Satibi *et al.*, 2021) yang dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur memerlukan dukungan manajemen yang terdiri dari Organisasi, Sumber Daya Manusia, Anggaran dan Sistem Informasi Manajemen untuk menciptakan proses pengelolaan obat yang baik Sumber Daya Manusia (SDM) juga sangat diperlukan dalam menunjang agar tujuan Penggunaan obat rasional dapat dicapai sehingga segala usaha untuk meningkatkan dan mengembangkan SDM kesehatan perlu dilakukan secara berkelanjutan dan sistematis, pola organisasi unit pengelola obat publik dan perbekalan kesehatan (UPOPPK) di Kabupaten juga merupakan jaminan profesionalisme dalam pengelolaan obat, adanya penanggung jawab dengan latar belakang sesuai dengan pendidikan, memperkecil potensi pemilihan obat dan alokasi dana yang tidak benar dan menjamin adanya informasi mengenai obat dan perbekalan kesehatan, menciptakan proses penganggaran yang dapat memaksimalkan suatu organisasi dan bahkan pengelolaan obat, sistem informasi bertujuan agar ketidakpastian dalam pengambilan keputusan dapat diminimalisir dan pengambilan keputusan dapat dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi (Kemenkes RI, 2010). Penelitian sebelumnya telah banyak dilakukan dengan menilai pengelolaan obat dan manajemen pendukungnya seperti pada penelitian oleh Yuniarti *et al.*, (2019) yang mengevaluasi management support pada pengelolaan obat di RSUD Kabupaten Ngawi; Boku *et al.*, (2021) yang melakukan evaluasi perencanaan dan distribusi obat program di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara; Nesi *et al.*, (2018) yang melakukan evaluasi perencanaan dan pengadaan obat di Instalasi Farmasi RSUD Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara; Aisah *et al.*, (2019) yang melakukan evaluasi pengelolaan obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Pati (Aisah *et al.*, 2019.), berdasarkan penelitian sebelumnya *management support* mempengaruhi proses pengelolaan obat dan beberapa penelitian menunjukkan *manajemen support* yang belum berjalan secara optimal yang tentunya mempengaruhi proses pengelolaan obat, berdasarkan penelusuran data dan dokumen pada tahun 2020-2021 di Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur, Pengelolaan obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur belum dilakukan secara optimal, sehingga penelitian ini dilakukan untuk melihat gambaran management support dalam pengelolaan obat yang meliputi organisasi, sumber daya manusia, anggaran dan sistem manajemen informasi yang mempengaruhi proses pengelolaan obat sebagai bentuk evaluasi untuk menentukan kebijakan yang berpengaruh terhadap manajemen support sehingga pengelolaan obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur dapat berjalan dengan lebih baik dan optimal.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian *deskriptif* yang dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur pada september 2022 - Januari 2023, data dikumpulkan melalui penelusuran data dan dokumen, observasi dan wawancara mendalam, observasi dilakukan melalui pengisian lembar checklist observasi dan untuk wawancara menggunakan pedoman wawancara mendalam yang telah divalidasi melalui *expert judgement*, wawancara dilakukan kepada informan yang di pilih secara *purposive sampling* yaitu kepala Dinas Kesehatan Kab. Kolaka Timur yang juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kepala sub bagian Program, Informasi dan Humas Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur, dan Kepala Instalasi Farmasi Kab. Kolaka Timur, data dianalisis secara *content analysis* dan disajikan dalam bentuk naratif, penelitian ini dilakukan berdasarkan *ethical approval* komisi etik penelitian kedokteran dan kesehatan, fakultas kedokteran, kesehatan masyarakat dan keperawatan Universitas Gadjah Mada-RSUP Dr Sardjito.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelusuran dokumen dan data yang dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur terkait pengelolaan obat menemukan seleksi, perencanaan obat, permintaan obat, penyimpanan obat, pencatatan, pelaporan, pengarsipan, dan pemantauan yang belum dilakukan secara optimal, Gambaran *Management Support* di Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur didapatkan melalui lembar *checklist* observasi dan wawancara mendalam dengan Kepala Dinas Kesehatan yang juga

Tabel I. Karakteristik Informan Penelitian

Informan	Jabatan	Jenis Kelamin	Pendidikan	Unit Kerja	Lama Jabatan (Tahun)
1	Kepala Dinas Kesehatan	L	S2 community health Development	Dinkes	4
2	Kepala Subbag perencanaan	L	S2 Kesehatan Masyarakat	Dinkes	7
3	Kepala Instalasi Farmasi	L	Profesi-Apoteker	IFK	2

berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Sub Bagian Program, Informasi dan Humas dan Kepala UPTD Instalasi Farmasi.

Organisasi

Dinas kesehatan Kabupaten Kolaka Timur merupakan unit kerja yang mengelola bidang kesehatan yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur No. 56 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Kabupaten Kolaka Timur, struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur sudah sesuai dengan peraturan yang ada dengan struktur : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Kesehatan Masyarakat; d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; e. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan; f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; g. Kelompok Jabatan fungsional Tugas pokok Dinas Kesehatan membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan wajib pemerintahan dibidang kesehatan sesuai Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, Dinas Kesehatan memiliki fungsi untuk perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kefarmasian (SDMK, 2022). Berdasarkan observasi setiap proses pengelolaan obat memiliki Standar Prosedur Operasional (SPO) obat yang direncanakan sesuai dengan formularium nasional, sesuai dengan data 10 penyakit terbesar dan disusun berdasarkan Rencana Kebutuhan Obat (RKO), perencanaan, pengadaan dan penerimaan obat dilakukan dengan berkoodinasi antara Dinas Kesehatan dan Instalasi Farmasi. Pengelolaan obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur dilakukan oleh tim perencanaan dan pengadaan obat walaupun saat ini belum terdapat Surat Keputusan (SK) untuk Tim Perencana Obat tetapi proses perencanaan dan pengadaan melibatkan bidang-bidang yang terkait, permintaan dan penerimaan obat dilakukan oleh UPTD Instalasi Farmasi bersama Sub bagian program, informasi dan humas dalam proses penerimaan barang dilakukan pemeriksaan segel, label, kesesuaian fisik obat dan faktur pembelian, nomor bets dan tanggal kedaluarsa pada saat penerimaan, untuk kegiatan penyimpanan obat kecuali pengelolaan vaksin dilakukan di UPTD Instalasi Farmasi, pengelolaan dan penyimpanan Vaksin dilakukan di Dinas Kesehatan oleh seksi surveilans dan imunisasi, sedangkan untuk obat program pencatatan dan administrasi dilakukan oleh Dinas Kesehatan tetapi untuk penyimpanan dan pendistribusian dilakukan melalui UPTD Instalasi Farmasi, pendistribusian obat, pengendalian obat, pencatatan, pelaporan dan pengarsipan dilakukan di UPTD Instalasi Farmasi sedangkan untuk pemantauan dan evaluasi pengelolaan obat UPTD Instalasi melakukan koordinasi dengan bidangan pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan, hal ini sejalan dengan wawancara kepada informan 3:

"Koordinasinya tetap harus berjalan dengan antar IFK dengan Dinas Kesehatan dan untuk karena setelah pejabat pengadaan melakukan pembelian melalui via e-catalog datang barangnya dan kemudian disimpan di IFK, IFK harus mengkonfirmasi apakah barang ini sesuai dengan kontrak yang ada atau tidak nah dari situ setelah disimpan dan diperiksa barulah masuk ke tahap berikutnya yaitu melakukan distribusi di Puskesmas."

Pengelolaan obat sebagian besar dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Instalasi Farmasi yang merupakan pelaksana teknis operasional Dinas di bidang Penyediaan, pengendalian dan pemantauan ketersediaan obat berdasarkan Peraturan Bupati Kolaka Timur No. 46 tahun 2017 yang berada di bawah Dinas Kesehatan dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan, susunan organisasi UPTD instalasi terdiri dari Kepala UPTD; Kasubag Tata usaha; dan

Jabatan Fungsional. Kepala Instalasi Farmasi dan Kepala sub Bagian Tata usaha dipimpin oleh Apoteker, UPTD Instalasi menjalankan fungsi dalam hal Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja UPTD; Pelaksanaan kebijakan teknis kefarmasian; penerimaan, pengelolaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, alat kesehatan dan perbekalan farmasi; penyiapan penyusunan rencana pencatatan dan pelaporan tentang penyediaan dan penggunaan obat, alat kesehatan dan perbekalan farmasi; pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga Instalasi Farmasi; dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, berdasarkan observasi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP belum dilakukan melalui sistem satu pintu karena penyimpanan vaksin masih dilakukan di Dinas Kesehatan seksi imunisasi selain itu Dinas Kesehatan dan Instalasi Farmasi memiliki pedoman pengorganisasian (struktur dan tupoksi), setiap petugas di Instalasi Farmasi bertugas untuk melaksanakan pengelolaan obat yang baik dan juga di berikan tugas tambahan kegiatan dan tugas yang diberikan sudah berjalan dengan baik. berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Informan 3:

"pastinya itu berjalan dengan baik karena itu sudah cukup untuk menjalankan seperti apa pekerjaan-pekerjaan yang ada di IFK itu sendiri baik itu mulai dari penyimpanan, pencatatan, pelaporan kemudian distribusi jadi saya rasa sudah cukup"

Dari hasil penelitian ini struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur No. 56 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Kabupaten Kolaka Timur dan Peraturan Bupati Kolaka Timur No. 46 tahun 2017, organisasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur berjalan dengan baik hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi (2013) struktur Dinas kesehatan Kabupaten Rejang Lebong sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah yang ada (Wahyudi and Suryawati, 2013), untuk Instalasi Farmasi Kabupaten juga memenuhi kriteria organisasi berbentuk UPTD penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Yuniarti *et al.*, (2019) struktur organisasi di IFRS RSUD Kabupaten Ngawi sudah berjalan dengan baik (Yuniarti *et al.*, 2021) dan juga penelitian oleh Ubit (2015) di Instalasi Farmasi Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar mengemukakan hasil untuk instalasi farmasi yang sudah berbentuk UPTD (Ubit, 2015).

Pembiayaan/Anggaran

Ketersediaan Anggaran yang cukup akan memastikan kegiatan pengelolaan obat dapat berjalan secara optimal, berdasarkan observasi dan penelusuran data yang dilakukan, anggaran yang tersedia untuk pengadaan obat meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) mencukupi meskipun obat yang direncanakan tidak dapat terpenuhi seluruhnya, selain anggaran untuk pengadaan obat, terdapat juga anggaran untuk alat tulis kantor, distribusi obat dan dana untuk melakukan monitoring dan evaluasi ke puskesmas, hal ini juga didukung dari hasil wawancara dengan informan 3:

"Kalau untuk soal anggaran untuk saat ini anggaran yang ada di Instalasi Farmasi itu masih terkoordinasi dengan DAK yang sampai saat ini selalu cukup bahkan lebih karena tidak semua kita belanjakan"

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 2 anggaran pembelanjaan obat selama ini besar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan selalu mencukupi kebutuhan, yang didukung juga oleh informan 1:

"Anggaran selalu cukup untuk pengadaan obat, hanya memang terkendala obat yang tidak tayang atau tidak bisa dibelanjakan"

*"Selama ini kita diberikan dana alokasi, DAK fisik sub bidang kefarmasian, dan selalu mencukupi".
informan 2*

Anggaran yang dialokasikan berdasarkan Peraturan Kabupaten Kolaka Timur No. 23 Tahun 2021 untuk kegiatan distribusi obat terdiri dari uang transportasi dan uang harian yang dihitung berdasarkan daerah distribusi obat, dari hasil wawancara kepada kepala instalasi anggaran yang diberikan sudah cukup untuk kegiatan monitoring dan evaluasi dipuskesmas.

"Sejauh ini sih anggaran untuk kegiatan distribusi dan kegiatan monev yah bisa dikatakan cukup untuk kegiatannya dapat berjalan"

Anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana untuk penyimpanan obat di Instalasi Farmasi menggunakan anggaran DAK, dana yang tersedia dibelanjakan melalui koordinasi dengan

dinas kesehatan menggunakan sistem pengadaan langsung. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penyediaan sarana prasarana untuk lemari narkotika, psikotropika dan prekursor belum memadai karena lemari penyimpanan belum memenuhi peraturan terkait penyimpanan narkotika, psikotropika dan prekursor, hal ini juga didukung dengan hasil wawancara kepada informan 3:

“Untuk lemari obat ini memang sudah dari beberapa tahun kemarin, untuk sementara kami sedang mengusulkan ke dinas kesehatan untuk dapat diadakan lemari yang baru.”

Pemusnahan obat kadaluarsa dari tahun 2020-2021 belum dilaksanakan, berdasarkan observasi hal ini dikarenakan karena tidak tersedianya insenerator di Kabupaten Kolaka Timur sehingga harus menggunakan jasa pihak ketiga, berdasarkan wawancara dengan informan 3:

“untuk sekarang karena proses pemusnahan obat kadaluarsa ini masih membutuhkan koordinasi dari pemerintah terkait, dari dinas-dinas terkait sehingga untuk sementara obat-obat yang kadaluarsa ditampung dulu di Instalasi Farmasi sambil menunggu keputusan untuk bagaimana pemusnahannya obat kadaluarsa sendiri.”

Wawancara dengan informan 2:

“Baru sebatas koordinasi saja dengan pihak ketiga, tapi untuk MOU-nya belum”.

Sedangkan untuk anggaran terkait pelatihan dan pengembangan SDM belum tersedia pada RKA Dinas Kesehatan namun berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan informan 2 anggaran untuk pelatihan tenaga kefarmasian sudah direncanakan untuk anggarakan pada tahun mendatang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, anggaran yang disediakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur sudah mencukupi kebutuhan pengadaan obat Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur namun perlu di tingkatkan untuk sarana dan prasarana, pemusnahan obat kadaluarsa, pemeliharaan gedung penyimpanan obat dan juga anggaran untuk pelatihan kepada pengelola kefarmasian di Instalasi Farmasi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hia (2013) di Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat yang masih memerlukan anggaran untuk pengadaan sarana pendukung dan kegiatan pengelolaan obat (Hia, 2013).

Sumber Daya Manusia

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2014 pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pengaturan, pembinaan, pengawasan dan peningkatan mutu tenaga kesehatan, perencanaan, pengadaan, dan pendayagunaan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan perlindungan terhadap tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas dan praktik. Sumber daya manusia berperan penting dalam proses pengelolaan obat, karena SDM mempengaruhi bagaimana suatu organisasi dapat berjalan dengan memanfaatkan anggaran dan juga Sistem Informasi Manajemen yang ada. Berdasarkan observasi yang dilakukan SDM dalam pengelolaan obat bidang perencanaan Dinas Kesehatan terdiri dari 1 kepala sub bagian program dengan pendidikan strata 2 Kesehatan Masyarakat, informasi dan humas yang juga merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan 1 orang staf yang juga merangkap sebagai Pejabat Pengadaan Dinas Kesehatan dengan pendidikan Strata 1 Teknik Sipil sedangkan berdasarkan observasi dilapangan SDM yang ada di Instalasi Farmasi Kabupaten dapat dilihat pada tabel II.

Berdasarkan tabel II, Instalasi Farmasi memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup, terdapat 10 pegawai 3 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 7 Orang honorer yang memiliki pembagian tugas masing-masing, untuk kegiatan distribusi, pengendalian, pencatatan dan evaluasi menjadi tanggung jawab bersama seluruh pegawai Instalasi Farmasi, dengan jumlah SDM saat ini sudah memenuhi kebutuhan Instalasi Farmasi berdasarkan wawancara terhadap informan 3:

“Kalau untuk masalah SDM-nya sendiri kalau untuk yang berjalan sekarang itu sudah memenuhi tapi kalaupun terdapat beberapa kekurangan-kekurangan di beberapa aspek mungkin itu bisa aja ditanggulangi sama staf yang sudah ada”

Kompetensi Pejabat Struktural UPTD berdasarkan Permenkes No. 971/Menkes/PER/XI/2019 tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan yaitu kepala UPTD berlatar belakang pendidikan tenaga medis, sejalan dengan hal tersebut Sumber daya manusia (SDM) di Instalasi Farmasi Sudah sesuai dengan PP nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian bahwa Fasilitas pelayanan kefarmasian dan fasilitas distribusi sediaan farmasi harus memiliki seorang apoteker sebagai penanggung jawab dan dapat dibantu oleh Apoteker

Tabel II. Data SDM di Instalasi Farmasi Kab. Kolaka Timur

No	Jabatan	Pendidikan	Status	Jumlah
1	Kepala Instalasi Farmasi	Apoteker	PNS	1
2	Kepala Tata Usaha	Apoteker	PNS	1
3	Bendahara Aset	S1 SKM	PNS	1
4	Pengelola obat program			
	a. Program Kusta	Apoteker	PNS/KTU	1
	b. Program hepatitis, HIV, Sifilis	S1 Farmasi	Honorer	1
	c. Program Filariasis	S1 SKM	Honorer	1
	d. Program GIZI, KIA, Malaria	SMA	Honorer	1
	e. Program TUBerkulosis	S1 farmasi	Honorer	1
	f. Program Diare	S1 Farmasi	Honorer	1
5	Sopir	SMA	Honorer	1
6	<i>Cleaning Service</i>	SMA	Honorer	1

pendamping dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian. Hal ini sejalan dengan wawancara kepada informan 3:

“Struktur organisasinya sendiri dia itu terdiri dari kepala UPTD kemudian ada Kasubag Tata Usaha dan kemudian staf. Nah kalau untuk stafnya ini semua terbagi lagi diberikan tugas tambahan, baik itu sebagai bendahara pengeluaran, bendahara barang dan pengelola obat programmer seperti itu kurang lebih gambarannya”

Kegiatan seleksi dilakukan oleh Instalasi Farmasi, Kegiatan Perencanaan oleh Pengelola obat puskesmas dan Instalasi Farmasi, kegiatan pengadaan dilakukan oleh Pegawai yang memiliki sertifikat pelatihan pengadaan barang dan jasa, saat ini pegawai yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa masih sangat terbatas di Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur sehingga perlu dilakukan pengembangan SDM untuk pelatihan barang dan jasa dan pengelolaan obat.

Berdasarkan profil SDM Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur tahun 2022, permasalahan yang sering terjadi terkait dengan SDM kesehatan yaitu masalah beban kerja, ketersediaan tenaga kesehatan, masalah terkait kompetensi, dan belum terintegrasinya sistem perencanaan dan masalah komunikasi internal, ketersediaan SDM yang memiliki sertifikat pengadaan masih sangat kurang, sehingga pada tahun 2020 dan 2021 Kepala Dinas Kesehatan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kepala Sub bagian program, informasi dan Humas merangkap sebagai Pejabat Teknis Pelaksana Kegiatan (PPTK) berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Boku *et al.*, (2019) jumlah SDM perlu disesuaikan dengan beban kerja agar pengelolaan obat dapat berjalan dengan baik (Boku *et al.*, 2019). Dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan maka pengembangan sumber daya manusia perlu dilakukan, penelitian oleh Itsnayain (2020) melalui intervensi pelatihan yang diberikan dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap pengelolaan obat tahapan kesesuaian obat dengan Fornas, dan penyimpanan obat LASA dan obat *high alert*, peningkatan kualitas SDM kesehatan sesuai kompetensi juga di harapkan dapat mendukung kebutuhan pembangunan kesehatan (Itsnayain, 2020) hal ini sejalan dengan penelitian oleh Panut (2018) bahwa kelancaran dan keberhasilan pengelolaan obat di Instalasi Farmasi Kabupaten sangat di dukung kualitas pengelola obat (Panut, 2018). Peningkatan SDM di Instalasi Farmasi Belum dilakukan terkait pengelolaan obat yang dilakukan saat ini penjelasan pekerjaan yang dilakukan dan pembagian tupoksi pekerjaan, pelatihan terkait pengelolaan obat secara terpadu belum pernah dilakukan, Berdasarkan wawancara dengan informan 3:

“kalau untuk di internal IFK itu sendiri selama ini belum ada tapi kalau untuk gambaran-gambaran tentang apa yang dikerjakan di IFK itu sendiri tentunya kami sudah memberikan mereka apa sih yang menjadi tupoksinya, apa sih yang menjadi pekerjaannya”

Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan wawancara dengan Informan 2 untuk tahun kedepannya sudah disiapkan anggaran untuk pelatihan dan peningkatan SDM di Instalasi Farmasi Kabupaten Kolaka Timur.

Hasil penelitian oleh Panut (2018) juga menunjukkan hasil yang sama terkait SDM di Instalasi Farmasi Kabupaten Mimika sebagian besar telah di kelola oleh tenaga kefarmasian dan penempatan SDM sesuai dengan bidang dan pekerjaannya karena kesesuaian dan kualitas pengelola obat berpengaruh terhadap proses pengelolaan obat.

Sistem Informasi Manajemen

Sistem Informasi Manajemen di Dinas Kesehatan dan Instalasi Farmasi di Kabupaten Kolaka Timur sudah dilakukan, berdasarkan observasi yang dilakukan perencanaan obat menggunakan RKO melalui aplikasi *e-monev*, untuk pengadaan obat dilakukan menggunakan *e-catalog*. Pembelian obat melalui aplikasi *e-catalog* lebih memudahkan dan memberikan transparansi dalam proses pengadaan namun ketersediaan obat di *e-catalog* menjadi kendala ketika akan membelanjakan obat tetapi tidak tersedia, sedangkan untuk di Instalasi Farmasi SIM dimanfaatkan melalui penggunaan Aplikasi Lembar Penggunaan dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) yang dibuat dan diberikan kepada puskesmas untuk mengisi data stok dan juga permintaannya, aplikasi ini berisi nama obat, satuan obat, harga, jumlah penerimaan, persediaan, pengeluaran, jumlah expired, stok akhir, permintaan obat dan kolom pemberian obat. Aplikasi ini membantu pengelola obat puskesmas untuk menginventarisasi data obat yang ada di puskesmas dan membantu instalasi farmasi memperkirakan pemberian obat untuk puskesmas. Selain itu terdapat aplikasi SIPNAP yang digunakan untuk pelaporan obat Narkotik, Psikotropik dan Prekursor, selain ini penggunaan aplikasi *e-logistik* oleh kementerian juga diterapkan di Instalasi Farmasi Kabupaten Kolaka Timur, aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan data obat dan BMHP yang terintegrasi dengan Kementerian untuk mendukung ketersediaan informasi dan pemantauan ketersediaan obat dan BMHP dari tingkat pusat hingga daerah, namun penggunaan aplikasi ini masih memiliki kendala karena perangkat untuk menjalankan aplikasi ini masih belum memadai.

Berikut petikan wawancara dengan informan 3:

"Kalau untuk sistem informasi manajemen yang ada di Instalasi Farmasi itu sendiri yang saat ini yang berjalan adalah terdapat aplikasi LPLPO yang dibuat sendiri adalah Instalasi Farmasi Kabupaten Kolaka Timur kemudian ada aplikasi tambahan lain seperti SIPNAP, ini aplikasi untuk pelaporan dan pendataan psikotropik dan narkotik yang kami laporkan ke Badan POM kemudian ada juga aplikasi e-logistik"

"tapi pada prosesnya terdapat kendala-kendala lah seperti apakah perangkat yang kurang memenuhi" informan 3

Berdasarkan penelusuran data dan observasi yang dilakukan kesesuaian jumlah distribusi ke subunit pelayanan masih terdapat ketidaksesuaian obat yang didistribusikan meskipun sudah menggunakan aplikasi LPLPO, sehingga diharapkan aplikasi yang terintegrasi antara puskesmas dan Instalasi Farmasi dan juga *update* obat yang tersedia di Instalasi Farmasi senantiasa di Perbaharui pada aplikasi LPLPO tersebut, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hia (2013) Sistem Informasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat belum dilakukan pengintegrasian dengan aplikasi pengelolaan obat yang sudah ada (Hia, 2013), penelitian oleh Yuniarti (2019) juga mengemukakan SIM yang terintegrasi sangat membantu dalam proses pengelolaan obat namun SIM tetap harus dikembangkan melihat permasalahan yang ada dan mengikuti perkembangan jaman, SIM yang tidak saling terintegrasi memungkinkan masalah yang lebih banyak muncul (Yuniarti et al., 2021).

Keterbatasan Penelitian

Wawancara dilakukan terbatas kepada Kepala Dinas Kesehatan, kepala sub bagian Program, Informasi dan Humas Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur, dan Kepala Instalasi Farmasi.

KESIMPULAN

Management support dalam pengelolaan obat di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur menunjukkan organisasi di Dinas Kesehatan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur No. 56 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Kabupaten Kolaka Timur dan Peraturan Bupati Kolaka Timur No. 46 tahun 2017. Anggaran untuk pengadaan obat bersumber dari dana DAK dan DAU, sedangkan anggaran untuk sarana prasarana, obat

kedaluarsa dan pelatihan perlu ditingkatkan lagi. Instalasi Farmasi di pimpin oleh seorang apoteker dan memiliki 9 orang Pegawai yang sudah mencukupi dalam kegiatan pengelolaan obat sedangkan SDM dibidang perencanaan dan pengadaan masih belum mencukupi dan masih terbatas. Sistem Informasi Manajemen dalam pengelolaan obat di Dinas Kesehatan menggunakan aplikasi *e-monev, e-catalog, e-logistik*, SIPNAP, LPLPO. Secara keseluruhan *Management support* dalam pengelolaan obat di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur belum berjalan optimal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur, Program studi Magister Manajemen Farmasi Universitas Gadjah Mada dan seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisah, N., Satibi, Suryawati, S., n.d. Evaluasi Pengelolaan Obat pada Tahap Perencanaan dan Pengadaan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pati. *Majalah Farmaseutik* Vol. 16 No. 1: 34-42.
- Boku, Y., Satibi, Yasin, N.M., n.d. Evaluasi Perencanaan dan Distribusi Obat Program di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara. *JMPF* Vol. 9 No. 2 : 88-100.
- Bupati Kolaka Timur. 2016. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur No. 56 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Kabupaten Kolaka Timur.
- Bupati Kolaka Timur. 2017. *Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur*. Kolaka Timur.
- Depkes RI. 2009. Undang Undang RI Nomor 51 Tentang Pekerjaan Kefarmasian. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI
- Hia, A.K., 2013. Evaluasi Pengelolaan Obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat Tahun 2010,2011 & 2012 (Thesis). Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Itsnayain, A.S., 2020. Pengaruh Intervensi Pelatihan Menggunakan Buku Indikator Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas Terhadap Pengelolaan Obat dan Pelayanan Farmasi Klinik di Puskesmas Kota Mataram (Thesis). Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Kemendes RI, 2010. Materi Pelatihan Manajemen Kefarmasian di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota.
- Nesi, G., Kristin, E., n.d. EVALUASI PERENCANAAN DAN PENGADAAN OBAT DI INSTALASI FARMASI RSUD KEFAMENANU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA.
- Panut, I., n.d. Evaluasi Pengelolaan Obat Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Di Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Papua (Thesis). Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Presiden RI. 2007. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota.
- Presiden RI. 2014. Undang-undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- Presiden RI. 2019. Permenkes No. 971/Menkes/PER/XI/2019 tentang standar kompetensi pejabat struktural kesehatan.
- Satibi, Prasetyo, S. dwi prasetyo, Rokhman, M.R., Aditama, H., n.d. Penilaian Mutu Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Gadjah Mada University Press.
- SDMK, K.Ti., 2022. Profil SDM Kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur, Kolaka Timur.
- Ubit, T.M.U., 2015. Analisis Pengelolaan Obat pada Era Jaminan Kesehatan Nasional Di Instalasi Farmasi Kota Banda Aceh dan Instalasi Farmasi Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh (Thesis). Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Wahyudi, S., Suryawati, S., 2013. Evaluasi penyimpanan dan distribusi obat di Instalasi Farnasi Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong (Thesis). Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Yuniarti, F.D., Satibi, S., Andayani, T.M., 2021. Evaluasi Management Support pada Pengelolaan Obat di RSUD Kabupaten Ngawi. *Majalah Farmaseutik* 17, 69.